

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI BUDAYA SEKOLAH BERBASIS NILAI-NILAI KEISLAMAN

Harmanto
UNESA, Jl. Ketintang Surabaya,
harmantofisunesa@gmail.com

Abstract: Corruption has become a kind of endemic in a country like Indonesia. It becomes our serious challenge therefore to deal with it properly and appropriately. This paper argues first and foremost that combating corruption through law enforcement is not enough. It proposes instead, that preventing corruption can only be effective and affective through education. By education we mean that which sharpens and softens the mindset, attitudes, and behavior of the educated. Our schools have hitherto been focusing on the cognitive aspect of education only ignoring in that process its spiritual and affective aspects. What is needed—this paper further argues—is value inculcation in the mind and heart of the students in such a way that when they grow up they can look after themselves as far as avoiding vices is concerned. Value inculcation in turn can only work when a religious education and instruction is involved. Hence, good education is what which incorporates religious teaching and doctrine into the system of education. It is to this point that this paper is destined.

Keywords: Anticorruption education, school culture, Islamic value.

Pendahuluan

Korupsi merupakan tantangan serius dalam pembangunan bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, bahkan dapat menghancurkan kehidupan spiritual masyarakat. Dalam bidang politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik karena mengabaikan kaidah-kaidah proses formal. Pada bidang hukum akan menyuburkan mafia peradilan dan mereduksi rasa keadilan dan ketertiban umum. Korupsi dalam bidang ekonomi akan menghambat pertumbuhan, terjadi inefisiensi, dan memperlemah

pembangunan ekonomi suatu negara.¹ Dalam bidang sosial dan budaya, korupsi akan melemahkan kontrol sosial dan meningkatnya rasa permisif masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi. Kontrol sosial itu dapat berupa mekanisme masyarakat dalam mengapresiasi prestasi yang dicapai sekaligus memberi sanksi sosial yang berat bagi anggota masyarakat yang berperilaku amoral,² termasuk di dalamnya perilaku korupsi.

Berdasarkan rilis *Transparency International Indonesia* (TII), selama kurun waktu tahun 2008-2011, besarnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia secara berturut-turut adalah 2.6, 2.8, 2.8, 3.0.³ Skor IPK Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara Brunei Darussalam (5.5), Malaysia (4.5), dan Thailand (3.3). Negara Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim paling besar dengan tingkat korupsi yang tinggi tidak dapat digunakan sebagai pembener bahwa Islam identik sarang koruptor. Negara Argentina, Meksiko, Filipina, dan Kolombia yang mayoritas beragama Kristen juga berindeks korupsi tinggi. Demikian juga di India dan Thailand yang mayoritas beragama Hindu dan Budha, indeks korupsi juga tidak jauh berbeda dengan Indonesia.⁴

Dalam perspektif Islam istilah yang sering dikaitkan dengan korupsi adalah *ghulûl*. *Ghulûl* secara leksikal dimaknai *akhdh al-shay' wa*

¹ Arif Rachman, "Bahaya Korupsi bagi Perekonomian", dalam http://bisnis.vivanews.com/news/read/104915/bahaya_korupsi_bagiperekonomian.

² M. Subhi Ibrahim dan Aan Rukmana, "Agama untuk Antikorupsi", dalam Wijayanto dan R. Zachrie (ed.), *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 836.

³ Secara lengkap laporan dari Transparency International Indonesia (TII) tahun 2008-2011 yang merilis IPK Indonesia berikut dengan argumen-argumennya dapat dilihat pada Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 2008: Indeks Indonesia Naik Signifikan", dalam <http://v1.ti.or.id/researchsurvey/93/tahun/2008/bulan/09/tanggal/23/id/3465>; Transparency International Indonesia, "Indek Persepsi Korupsi 2009: Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Lemah", dalam <http://v1.ti.or.id/researchsurvey/93/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4675/>; Transparency International Indonesia, "Indek Persepsi Korupsi 2010: Corruption as Usual", dalam <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/10/26/corruption-perception-index-2010-global>; dan Transparency International Indonesia, "Corruption Perception Index 2011: Indonesia Masih Berada di Jajaran Bawah Negara-negara Terbelenggu Korupsi", dalam <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2011/12/01/corruption-perception-index-2011>.

⁴ Azumardi Azra, "Agama dan Pemberantasan Korupsi", *Kompas* (5 September 2005).

dassubû fi matâ'ibi, yang artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.⁵ Dalam sejarah Islam, terminologi *ghulûl* muncul karena ada penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selain konsep *ghulûl*, ada istilah *rishwah* yang bermakna komisi, hadiah, upah, dan pemberian, yang dapat pula diberikan arti sebagai uang sogok,⁶ sementara dalam QS. al-Mâi'dah [5]: 38, menyinggung masalah *ghasab* dan *saraqah*. *Ghasab* adalah mengambil sesuatu dari orang lain dengan cara paksaan dan *saraqah* adalah perilaku mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi, dan masih banyak ayat-ayat al-Qur'ân yang berisi tentang korupsi dalam makna yang luas.⁷ Hal ini memberikan pandangan bahwa korupsi merupakan larangan dalam kehidupan Islam. Melihat akibat dan jumlah kerugian maka korupsi merupakan perbuatan yang jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan mencuri.⁸

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi, seperti pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Usaha yang dilakukan patut mendapatkan apresiasi, namun masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini berarti pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup dengan penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan semangat dan atmosfer antikorupsi melalui pendidikan formal (sekolah) karena “sekolah adalah proses pembudayaan”.⁹ Caranya, sekolah memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan perilaku antikorupsi. Satu dari sekian upaya dalam Pendidikan Antikorupsi (PAK) di sekolah dengan cara mengintegrasikan melalui budaya islami terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter siswa agar memiliki sikap dan perilaku antikorupsi. Budaya sekolah merupakan *the behind-the-scenes context that reflects the values, beliefs, norms,*

⁵ Ibid., 819.

⁶ Ibid., 820.

⁷ Ibid., 825.

⁸ Ulul Albab, *A to Z: Korupsi Menumbuhkan Spirit Antikorupsi* (Surabaya: Jaring Pena, 2009), 188.

⁹ Fuad Hassan, *Pendidikan adalah Pembudayaan: dalam Pendidikan Manusia Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2004), 10.

*traditions, and rituals that build up over time as people in a school work together.*¹⁰

Budaya sekolah merupakan nilai-nilai, norma-norma, tradisi-tradisi, ritual-ritual, yang telah dibangun dalam kurun waktu lama oleh warga sekolah. Sedangkan budaya islami dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam menjadi pola sikap, perilaku, ritual, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan di sekolah.¹¹ Pengembangan nilai budaya islami di sekolah yang mendukung PAK seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, mentaati peraturan, adil, kerja keras, sederhana, dan lain-lain. Nilai-nilai di atas baik dalam al-Qur'ân maupun Ḥadīth telah dipaparkan secara jelas dan terperinci.¹² Habitiasi budaya islami yang mendukung PAK harus melibatkan seluruh komponen yakni kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan petugas kebersihan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan di sekolah. Meminjam istilah yang disampaikan Budimansyah adalah mewujudkan orde sosial yang baik dan kondisi yang diharapkan (*desirable condition*) melalui berbagai penguatan nilai-nilai baik/positif yang ada di sekolah¹³.

Mengingat yang dibangun dalam gerakan sosio-kultural warga sekolah adalah pranata sosial yang berisikan tentang sistem nilai dan norma antikorupsi berdasarkan nilai-nilai islami, maka sekolah perlu menyediakan ruang bagi siswa untuk dapat mengaktualisasikan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Pentingnya budaya islami di sekolah dalam membentuk karakter karena kesehatan paru-paru anak terbentuk sangat bergantung pada bagaimana mereka menghirup udara di sekelilingnya. Kalau udara yang dihirup bagus, maka anak akan sehat. Begitu pula dengan pembentukan karakter anak sangat bergantung bagaimana mereka menghirup “udara moral” di

¹⁰ Terrence Deal and Ken D. Peterson, “Strategies for Building School Cultures: Principals as Symbolic Leaders”, dalam M. Sashkin & H.J. Walberg (ed.), *Educational Leadership and School Culture* (Berkeley, CA: McCutchan, 1993), 88.

¹¹ Badrus Soleh, “Peran Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Islami di SMAN 2 Jember” (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), 41.

¹² Suparlan, “Membangun Budaya Sekolah”, dalam www.suparlan.com/pages/post/membangun-budaya-sekolah238.php.

¹³ Dasim Budimansyah, “Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi”, dalam pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung: Tidak diterbitkan, 2009), 20.

sekelilingnya. Anak akan berada di sekolah sepanjang hari, apabila sekolah dapat memberikan udara yang penuh dengan kasih sayang, kebaikan, kebajikan, penghormatan, maka karakter anak akan baik.¹⁴ Pendapat di atas menunjukkan bahwa pendidik menjadi model dalam melaksanakan budaya islami bagi peserta didik di sekolah sebagai bentuk *uswah hasanah* yang merupakan sunah Rasulullah.

Budaya Islami dalam Realitas Sekolah

Menurut pandangan kepala sekolah dan guru, tujuan PAK untuk mendidik siswa agar mempunyai sikap jujur dalam segala hal sebagai bekal di kemudian hari, di mana kejujuran merupakan nilai islami yang sangat dianjurkan. Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat jujur dan menempatkan kejujuran sebagai bagian dari kehidupan dalam masyarakat. Di semua sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini menunjukkan bahwa visi sekolah selalu menampilkan rumusan yang berbasis pada nilai-nilai religius. Misalnya, SMPN A (Kota Surabaya) mempunyai visi *berprestasi, berdaya saing global berdasarkan iman dan takwa*. SMPN B (Kabupaten Lamongan), ... *menjadi sekolah yang berprestasi, berbudaya, agamis, peduli lingkungan, dan berwawasan global*. Visi SMPN F (Kota Madiun) adalah terwujudnya *IMTAQ-IPTEKS, berbasis karakter, lingkungan yang sehat dan lingkungan hidup yang berwawasan internasional*.¹⁵ Demikian juga dengan SMPN C (Kabupaten Pasuruan), SMPN D (Kota Malang), dan SMPN E (Kabupaten Mojokerto) menjadikan iman dan takwa sebagai frasa dalam rumusan visi sekolah.¹⁶ Mengingat bahwa mayoritas warga di SMPN A, SMPN B, SMPN C, SMPN D, SMPN E, dan SMPN F beragama Islam, maka praktik-praktik visi tersebut pada hakikatnya bersumber dari ajaran agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan penanggung jawab kantin kejujuran di SMPN A, SMPN B, SMPN C, SMPN D, SMPN E, dan SMPN F, mereka sepakat bahwa kantin kejujuran menjadi pilihan utama sebagai budaya islami di sekolah

¹⁴ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa* (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2004), 152.

¹⁵ Dokumentasi Visi, Misi, dan Program Kerja Tahun 2011 SMPN A, 4 Januari 2011, Dokumentasi Visi, Misi, dan Program Kerja Tahun 2011 SMPN B 18 Januari 2011, dan Dokumentasi Visi dan Misi SMPN F 18 Juli 2011.

¹⁶ Dokumentasi Visi, Misi, dan Kebijakan SMPN C 17 Februari 2011, Dokumentasi Visi, Misi, dan Program Kerja SMPN D, 2 Maret 2011, dan Dokumentasi Visi, Misi, dan Program Kerja SMPN E, 4 April 2011.

untuk menghabituisikan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin diri, kepedulian, dan rasa memiliki.¹⁷ Sekolah yang membuka kantin kejujuran ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada tahun 2009. Pada tahap awal Kejati Jawa Timur memberikan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membuat atau membuka kantin kejujuran di sekolah. Seiring dengan perjalanan waktu, setiap sekolah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tentang model pengelolaan kantin kejujuran. Jika diklasifikasi model pengelolaan kantin kejujuran dibagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Semi terbuka, dengan variasi (1) siswa mengambil barang kemudian membayar dengan uang pas sesuai dengan harga barang dan tidak bisa mengambil uang kembalian, seperti di SMPN A, (2) siswa menyerahkan uang dulu ke petugas jika uang untuk membeli memerlukan uang kembali, tetapi jika menggunakan uang yang sesuai dengan harga barang, pembeli tinggal memasukkan uang pada tempat yang telah disediakan (dibuat seperti kotak amal di masjid), kemudian baru mengambil barang, seperti di SMPN B, (3) Siswa memasukkan uang ke tempat yang telah disediakan, kemudian meminta kepada petugas untuk mengambilkan barang, seperti di SMPN F. Di SMPN F, kantin kejujuran tidak menjual makanan ringan karena menjadi sekolah sehat nasional. Jadi, yang dijual adalah makanan yang tidak menggunakan pembungkus plastik, menggunakan zat pewarna, pemanis, dan pengawet buatan, tetapi kantin kejujuran lebih banyak menjual makanan seperti bakso, siomai, soto ayam, nasi pecel sehingga memang penjual yang harus mengambilkan. Tetapi jika yang dibeli pisang goreng,

¹⁷ Jamaliyah, *Wawancara*, Surabaya, 5 Januari 2011; Sadimun, *Wawancara*, Surabaya, 5 Januari 2011; Betti S., *Wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2011; Adib S., *Wawancara*, Lamongan, 8 Januari 2011; Sutrisno dan Suciati, *Wawancara*, Lamongan, 8 Januari 2011; Maria Ulfa, *Wawancara*, Lamongan, 11 Januari 2011; M. Rofiq, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011; Slamet, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011; Siti Maimunah, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011; Sudarmanto, *Wawancara*, Malang, 2 Maret 2011; Endang Mudjianti, *Wawancara*, Malang, 5 Maret 2011; Eni Riyanti, *Wawancara*, Malang, 5 Maret 2011; Heru Subiyantoro, *Wawancara*, Mojokerto, 4 April 2011; Handoyo Purbo dan Eko Narianto, *Wawancara*, Mojokerto, 6 April 2011; Sulasmining, *Wawancara*, Mojokerto, 6 April 2011; Ninik Rahayu, *Wawancara*, Madiun, 26 Juli 2011; Any Haryanti dan Suparti, *Wawancara*, Madiun, 26 Juli 2011; dan Lin Sumastuti Rahayu, *Wawancara*, Madiun, 26 Juli 2011.

ketela goreng, dan sejenisnya, maka pembeli dapat mengambil sendiri.¹⁸

- b. Terbuka penuh, yakni pembeli secara bebas dapat mengambil barang, menyerahkan uang, dan mengambil uang kembalian secara mandiri (*self service*). Kantin tidak ada yang menjaga, hanya dicek petugas pada pagi dan siang hari, seperti di SMPN C Kabupaten Pasuruan, SMPN D Kota Malang, dan SMPN E Kabupaten Mojokerto.¹⁹

Berdasarkan data laporan keuangan kantin kejujuran bahwa praktik kantin kejujuran di SMPN A masih kurang baik. Indikator yang nampak adalah grafik saldo kantin kejujuran menurun setiap tahun. Pada tahun 2009 modal yang diberikan adalah Rp. 2.000.000,- dari Kejati Jawa Timur dan Rp. 600.000,- swadaya mandiri sekolah. Saldo akhir tahun 2010 sebesar Rp. 2.300.000 (sudah termasuk barang yang ada di kantin). Sedangkan pada tahun 2011 saldo per Juni sebesar Rp. 2.400.000 (sudah termasuk barang yang ada di kantin).²⁰ Data yang menarik untuk diketengahkan berkaitan dengan kantin kejujuran di SMPN A, periode waktu kantin kejujuran mengalami kerugian pada tahun 2010 dan 2011 relatif sama, antara akhir bulan April-akhir Juni. Penanggung jawab kantin kejujuran tidak bisa memberikan analisis tentang penyebab kerugian pada bulan-bulan tersebut. Tetapi siswa memberikan informasi yang menarik bahwa kantin kejujuran mengalami kerugian pada bulan April-akhir Juni karena banyak siswa yang tidak membayar, khususnya kelas IX. Siswa kelas IX sudah mendekati lulus sehingga ada keberanian untuk tidak membayar ketika membeli di kantin kejujuran. Siswa kelas VII dan VIII yang menjadi informan dalam penelitian ini sudah tiga kali menjumpai siswa kelas IX secara berkelompok tidak membayar saat mengambil makanan di kantin kejujuran.²¹

Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di SMPN D, kantin kejujuran bukan saja mengalami kerugian, namun keberadaannya sudah tidak lagi diurus secara intensif. Kepala sekolah memberikan informasi bahwa hal itu terjadi karena ada tiga faktor yang

¹⁸ Observasi di kantin kejujuran di SMPN A, 3-8 Januari 2011, SMPN B, 8-11 Januari 2011, dan SMPN F, 21-23 dan 26 Juli 2011.

¹⁹ Observasi di SMPN C, 17-20 Januari 2011, SMPN D, 2 dan 5 Maret 2011, dan SMPN E, 4-6 April 2011.

²⁰ Dokumentasi laporan keuangan kantin kejujuran di SMPN A, 10 Januari 2011.

²¹ Betti S., *Wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2011.

menyebabkan, yakni (1) makanan yang disajikan di kantin kejujuran kurang menarik dan kurang bervariasi seperti halnya di kantin yang ada penjualnya, (2) beberapa makanan yang tidak laku dalam kurun waktu yang lama sehingga menyentuh titik *expired date*-nya, ini akan menimbulkan kerugian, (3) kurang sosialisasi, tidak ada kader kantin kejujuran, dan guru serta staf yang tidak memberikan contoh untuk membeli di kantin kejujuran.²² Sedangkan menurut siswa, kantin kejujuran tidak berkembang dan mengalami kerugian karena: (1) letaknya yang di pojok dengan jumlah makanan yang dijual tidak terlalu banyak, (2) anak yang mau membeli khawatir tidak ada uang kembaliannya, (3) memang ada yang curang, mengambil barang tidak sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya dibayar. Biasanya dilakukan secara berkelompok agar tidak kelihatan.²³ Sementara, guru dan penanggung jawab kantin kejujuran memberikan argumentasi lain bahwa kantin kejujuran belum menjadi prioritas utama dalam mengembangkan budaya islami di sekolah, tetapi dengan aktivitas yang lain yakni doa bersama yang terpusat dengan menggunakan doa islami dan peringatan hari besar agama Islam. Di samping itu, guru-guru juga jarang membeli di kantin kejujuran.²⁴

Sedangkan di SMPN B, kantin kejujuran berjalan dengan baik. Indikator yang nampak adalah grafik saldo dalam kantin kejujuran yang naik setiap tahun. Pada tahun 2009 modal yang diberikan adalah Rp. 2.000.000,- dari Kejati Jawa Timur dan swadaya mandiri sekolah sebesar Rp. 350.000,-. Sampai dengan tahun 2011 saldo per bulan Juni sebesar Rp. 3.750.500 (sudah termasuk barang yang ada di kantin).²⁵

Kondisi yang sama juga di SMPN C, dengan menggunakan sistem yang terbuka kantin kejujuran masih tetap eksis, bahkan mendapatkan keuntungan. Kepala sekolah, guru, dan penanggung jawab kantin kejujuran memberikan informasi bahwa hal itu terjadi karena semua komponen terus-menerus mensosialisasikan pada saat upacara maupun pada pembelajaran yang ada hubungannya dengan kejujuran pasti akan disinggung oleh guru khususnya pada saat

²² Sudarmanto, *Wawancara*, Malang, 2 Maret 2011.

²³ Ikke Aima Aluka dan Oryza Aditya W., *Wawancara*, Malang, 5 Maret 2011.

²⁴ Endang Mudjianti, *Wawancara*, Malang, 5 Maret 2011; dan Eni Riyanti, *Wawancara*, Malang, 5 Maret 2011.

²⁵ Dokumentasi laporan keuangan kantin kejujuran di SMPN B, 11 Januari 2011.

pelajaran Agama Islam dan PKn.²⁶ Sedangkan menurut siswa, ketika mereka ditanya mengapa kantin kejujuran tetap ada, tidak mengalami kerugian bahkan ada keuntungan?, mereka menjawab bahwa kantin kejujuran bagi siswa SMPN C adalah kebanggaan tersendiri yang bisa menjadi bahan cerita kepada teman sekolah lain. Kantin kejujuran di SMPN C sampai dengan tahun 2011 merupakan satu-satunya kantin sekolah di Kabupaten Pasuruan, sehingga mereka dengan bangga menceritakan kepada orang lain.²⁷ Pada saat *launching* kantin kejujuran, kepala sekolah juga mengundang orang tua siswa agar mereka juga berperan dalam mendorong putra-putrinya untuk bersikap jujur ketika melakukan transaksi di kantin. Demikian juga kondisi di SMPN E dan F. Selain kantin kejujuran di SMPN A, budaya islami yang dihabituisasikan di sekolah yang memberikan kontribusi dalam PAK adalah kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, kesopanan, kesantunan, dan Senyum, Salam, Sapa (3S). Budaya-budaya tersebut sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Budaya islami yang dikembangkan di SMPN A diperkuat melalui mata pelajaran Agama Islam di kelas maupun di luar kelas.²⁸

Sementara di SMPN B strategi pengembangan budaya islami dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Strategi Habituisasi Sikap dan Perilaku Siswa SMPN B²⁹

Nalai-nilai yang dihabituisasikan	Strategi
Kedisiplinan	Jam masuk, pulang, atribut sekolah, tidak membawa HP, keteladanan, salat zuhur atau Jum'at bersama
Kejujuran	Ulangan, mengerjakan tugas, kas kelas, keteladanan
Tanggung jawab	Kas kelas dan keteladanan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, nilai kedisiplinan, dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik. Budaya islami di SMPN B yang menonjol yang mendukung PAK adalah praktik kejujuran pada saat Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS), dan

²⁶ M. Rofiq, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011; Slamet, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011; dan Siti Maimunah, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011.

²⁷ Yulia Kodrianti dan Enriko Willmanda, *Wawancara*, Pasuruan, 18 Februari 2011.

²⁸ M. Rofiq, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011.

²⁹ Observasi di SMPN D, Malang, 2 dan 5 Maret 2011.

Ujian Akhir Semester (UAS). Menyontek dan perbuatan curang lain pada saat ujian sangat ditekankan, ditanamkan, dan dihabituasikan di sekolah ini. Guru agama Islam memberikan istilah ketika mensosialisasikan budaya ini dengan kata-kata “menyontek haram hukumnya di sekolah ini”. Ketika ada siswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian, maka petugas jaga akan langsung menyobek lembar jawaban siswa lima menit sebelum waktu ujian habis. Artinya masing-masing siswa diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan namun waktu yang diberikan hanya lima menit, tidak lebih dan tidak kurang. Kondisi ini dibuktikan ketika UAS semester gasal 2011/2012 suasana kelas sangat tenang, tertib, dan tidak ada satupun siswa di setiap ruangan yang saling berbisik antarsiswa.³⁰ Budaya ini tidak ditemui di SMPN A, C, D, E, dan F. Keberhasilan budaya di SMPN B bila ditelisik lebih jauh karena ada dukungan orang tua. Orang tua sejak awal sudah diberikan sosialisasi tentang budaya antimenyontek, sehingga diharapkan hal sejenis juga akan dikuatkan di rumah sebagai tempat pertama dan utama dalam pendidikan anak. Salat Zuhur dan Jum’at bersama juga dilakukan dengan rutin, disiplin, dan tanggung jawab, meskipun masih harus diatur dan dibimbing oleh guru, merupakan budaya islami yang juga dihabituasikan di SMPN B.

Demikian juga halnya di SMPN C, nilai-nilai islami yang akan dihabituasikan melalui budaya sekolah yang memberikan kontribusi dalam PAK adalah kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab.³¹ Strategi yang dikembangkan agar nilai-nilai tersebut berhasil tidak berbeda dengan SMPN B. Perbedaannya terletak pada habituasi salat *Duḥâ* berjamaah bagi kelas IX, salat Zuhur dan salat Jum’at untuk semua siswa.

Habituasasi berbasis islami lain yang mendukung PAK di SMPN D adalah membudayakan rasa malu dan sembilan (9) K. Budaya rasa malu karena: (1) datang terlambat/pulang cepat, (2) melihat rekan sibuk melakukan aktivitas, (3) melanggar peraturan, (4) berbuat salah, (5) bekerja tidak berprestasi, (6) tugas tidak selesai tepat waktu, dan (7) tidak berperan dalam mewujudkan kebersihan kantor/sekolah. Sedangkan sembilan K meliputi (1) keamanan, (2) kebersihan, (3) keindahan, (4) ketertiban, (5) kekeluargaan, (6) kerindangan, (7)

³⁰ Ibid.

³¹ Observasi di SMPN C, Pasuruan, 17-20 Januari 2011.

kesehatan, (8) keteladanan, dan (9) keterbukaan.³² Datang terlambat, melanggar peraturan, dan tugas tidak selesai tepat waktu merupakan budaya rasa malu yang dekat dengan PAK di sekolah. Sementara itu keteladanan dan keterbukaan merupakan sembilan budaya yang bersinggungan dengan PAK. Usaha yang telah dilakukan selama ini adalah (1) ketika ada siswa yang terlambat siswa diminta untuk melapor langsung kepada petugas dengan penuh kesadaran, (2) siswa yang melanggar peraturan, misalnya atribut seragam sekolah, dengan jujur dan terbuka melaporkan jenis pelanggaran kepada petugas tidak perlu petugas mencari jenis pelanggarannya, (3) melakukan himbauan melalui *running text* yang akan diganti dalam setiap minggu sesuai dengan konteks atau hal-hal penting yang harus disampaikan khususnya kepada siswa, (4) membuat himbauan melalui kata-kata yang diletakkan di tembok, pagar sekolah, maupun tempat lain yang strategis. Kata-kata itu antara lain: *tepat waktu adalah cermin kepribadian, marilah belajar mulai sekarang, coming late is embarrassing, terlambat itu memalukan, sebuah prestasi dapat diraih melalui usaha keras dan disiplin, keteladanan adalah guru yang berbarga*, dan (5) kepala sekolah, guru, staf administrasi diminta untuk selalu memberikan contoh agar siswa dapat melihat figur yang dapat dijadikan model untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan budaya yang dikembangkan di sekolah.³³

Di SMPN F, budaya islami selain kantin kejujuran yang mendukung PAK, yakni mengembangkan nilai: (1) disiplin tanpa diawasi, (2) bekerja tanpa diperintah, dan (3) tanggung jawab tanpa diminta. Nilai-nilai tersebut ditambah dengan 11 (sebelas) K, yakni: (1) keamanan, (2) kebersihan, (3) ketertiban, (4) keindahan, (5) kekeluargaan, (6) kesehatan, (7) kerindangan, (8) kedisiplinan, (9) kepedulian, (10) kejujuran, dan (11) keramahan. Rumusan dalam tiga budaya ditambah dengan ketertiban, kepedulian, dan kejujuran yang ada dalam 11 K merupakan bentuk dorongan dan dukungan terhadap PAK di sekolah ini.³⁴ Lima belas menit sebelum jam pertama dimulai, setiap siswa dan guru di sini wajib membaca apa saja asalkan hal-hal yang positif. Membaca koran sekalipun juga diperbolehkan, tetapi dalam praktik siswa dan guru lebih banyak membaca materi pelajaran sekolah. Siswa juga wajib menanggalkan sepatu di luar dan meletakkan

³² Dokumentasi Jenis-jenis Budaya Sekolah di SMPN D, Malang, 5 Maret 2011.

³³ Sudarmanto, *Wawancara*, Malang, 2 Maret 2011.

³⁴ Ninik Rahayu, *Wawancara*, Madiun, 26 Juli 2011.

di rak yang telah disediakan di kelas masing-masing.³⁵ Kepala sekolah dalam kesempatan terpisah mengajak peneliti untuk keliling kelas pada jam pertama. Pada kelas tertentu berhenti untuk menghitung jumlah sepatu yang ada di kelas VIII E (ada 31 pasang sepatu), kemudian meminta izin kepada guru untuk masuk kelas. Kepala sekolah bertanya kepada guru berapa jumlah anak yang masuk hari ini. Guru memberikan jawaban 32 anak. Kemudian kepala sekolah bertanya kepada siswa, “anak-anakku sekalian, berapa orang yang tidak masuk hari ini?”, para siswa pun menjawab, “tidak ada, bu”. Kepala sekolah pun kemudian menimpali jawaban siswanya, “baik kalau begitu, berarti ada yang tidak disiplin dan tidak jujur di kelas ini. Saudara masih ingat bahwa disiplin dan jujur merupakan budaya yang akan kita kembangkan di sekolah ini, siapa yang merasa belum jujur dan disiplin hari ini?”.³⁶ Setelah kepala sekolah berkata begitu ada satu siswa yang mengacungkan tangan, kemudian keluar dengan kesadaran melepas dan menaruh sepatu pada rak yang telah disediakan. Kepala sekolah biasanya pada kesempatan lain akan memanggil guru yang bersangkutan agar dalam waktu tertentu secara mendadak mengadakan pengecekan terhadap kedisiplinan dan kejujuran siswa sebagaimana yang telah dilakukan kepala sekolah. Apa yang dilakukan kepala sekolah sama sekali tidak sedang melakukan intervensi tetapi memang sedang memberikan contoh (keteladanan) kepada guru dan siswa serta dalam kerangka supervisi kelas. Kepala sekolah berkeyakinan bahwa kunci kesuksesan diawali dari kedisiplinan, ketertiban, dan kejujuran.³⁷

Habitulasi lain yang dikembangkan di semua sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini adalah setiap kelas diwajibkan untuk membuat kas yang ditarik setiap minggu sebesar Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 2.500,-/siswa. Keuangan kelas akan dikelola oleh pengurus kelas di bawah bimbingan dan supervisi wali kelas. Kas kelas berasal dari, oleh, dan untuk siswa. Misalnya, untuk kepentingan foto kopi, alat-alat kebersihan kelas, menengok temannya apabila ada yang sakit. Setiap minggu pengurus menyampaikan laporan keuangan kepada seluruh siswa dalam satu kelas. Tanggung jawab, kejujuran, dan keterbukaan diharapkan akan menjadi laten dalam diri siswa dengan adanya praktik kas kelas ini. Dalam pandangan kepala sekolah, guru,

³⁵ Observasi di SMPN F, Madiun, 29 September 2011.

³⁶ Ninik Rahayu, *Wawancara*, Madiun, 26 Juli 2011.

³⁷ Ibid.

dan siswa, praktik kas kelas merupakan bentuk budaya yang mendukung PAK di sekolah.³⁸

Budaya Islami: Akar Pendidikan Antikorupsi

PAK di sekolah tidak hanya diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran yang ada akan tetapi perlu didukung dengan habituasi yang dapat dikemas dalam bentuk budaya sekolah. Bentuk-bentuk budaya sekolah itu antara lain kantin kejujuran, larangan menyontek, pengadaan kas kelas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan lain-lain. Budaya sekolah yang berbasis nilai-nilai islami pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi sekolah yang mengandung aspek religius. Spirit ajaran Islam yang menjadi visi sekolah efektif mendukung keberlangsungan PAK karena ada kesamaan antara nilai-nilai islami dengan nilai-nilai yang dikembangkan dalam PAK di sekolah.

Kantin/warung kejujuran masih menjadi pilihan pertama dan utama bentuk budaya islami yang mendukung PAK. Jika kantin kejujuran diandaikan sebuah negara, maka pembeli merupakan pengejawantahan dari aparat negara. Misalnya, ketika aparat negara membeli barang dengan harga Rp. 1.000,- jika ia membayar dengan uang Rp. 1.000,- berarti ia merupakan aparat negara yang baik. Sementara jika ia mengambil barang dan tidak membayar pada dasarnya merupakan korupsi untuk keuntungan pribadi. Kasus lainnya, ketika membayar dengan uang Rp. 5.000, tetapi mengambil uang kembali sebanyak Rp. 6.000, berarti telah melakukan korupsi ganda, yakni tidak membayar barang yang telah dibeli dan mengambil uang kembali yang lebih banyak dari seharusnya, dan masih banyak lagi berbagai kemungkinan kasus korupsi yang lain.

³⁸ Jamaliyah, *Wawancara*, Surabaya, 5 Januari 2011; Sadimun, *Wawancara*, Surabaya, 5 Januari 2011; Betti S., *Wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2011; Adib S., *Wawancara*, Lamongan, 8 Januari 2011; Sutrisno, Suciati, *Wawancara*, Lamongan, 8 Januari 2011; Maria Ulfa, *Wawancara*, Lamongan, 11 Januari 2011; M. Rofiq, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011; Slamet, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011; Siti Maimunah, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011; Sudarmanto, *Wawancara*, Malang, 2 Maret 2011; Endang Mudjianti, *Wawancara*, Malang, 5 Maret 2011; Eni Riyanti, *Wawancara*, Malang, 5 Maret 2011; Heru Subiyantoro, *Wawancara*, Mojokerto, 4 April 2011; Handoyo Purbo dan Eko Narianto, *Wawancara*, Mojokerto, 6 April 2011; Sulasmining, *Wawancara*, Mojokerto, 6 April 2011; Ninik Rahayu, *Wawancara*, Madiun, 26 Juli 2011; Any Haryanti dan Suparti, *Wawancara*, Madiun, 26 Juli 2011; dan Lin Sumastuti Rahayu, *Wawancara*, Madiun, 26 Juli 2011.

Keberadaan kantin kejujuran secara substansial memberikan kontribusi dalam pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi.³⁹ Temuan menarik dari praktik kantin kejujuran ini adalah (1) kantin kejujuran yang berhasil dengan indikator adanya keuntungan dari tahun 2009-2011 berlokasi di kota kecil, sementara kantin yang kurang berhasil berada di kota besar. Keberhasilan kantin kejujuran disebabkan sistem pengelolaan, sosialisasi sekolah, dan dukungan orang tua. Khusus di SMPN B, keberhasilan kantin kejujuran karena didukung oleh budaya antimenyontek yang sudah ada jauh sebelum ada kantin kejujuran. Budaya semacam ini secara rutin dihabituisasikan secara turun-temurun dari kakak-kakak kelas kepada adik-adiknya.⁴⁰ Di SMPN C dengan menggunakan sistem terbuka juga mendapatkan keuntungan selama periode Desember 2009 sampai dengan Juli 2011.⁴¹ Keberhasilan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain (1) sosialisasi yang terus-menerus, jika ada kerugian pada hari tertentu, maka pada saat doa bersama diumumkan bahwa di kantin kejujuran ada kehilangan barang dan mohon siswa mendoakan agar yang berbuat tidak jujur segera diberi keinsyafan, dan (2) keberadaan kantin kejujuran bagi siswa SMPN C menjadi kebanggaan dimanifestasikan dengan menceritakan kepada teman-temannya yang berbeda sekolah. Sedangkan faktor eksternal antara lain (1) adanya dukungan dari orang tua. Orang tua sangat *mewanti-wanti* (menasehati dengan ditekan) jangan sekali-kali tidak membayar atau curang pada saat membeli di kantin kejujuran, dan (2) lokasi sekolah yang ada di ibukota kecamatan dan lingkungan masyarakat yang agamis diduga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan kantin kejujuran di SMPN C.

Kerugian kantin kejujuran di SMPN A dan SMPN D karena siswa tidak membayar sesuai dengan ketentuan dan kurangnya dalam sosialisasi kepada orang tua. Siswa yang tidak membayar bukan semata-mata tidak mempunyai uang tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh temannya sebagai bentuk solidaritas. Tidak jarang siswa justru

³⁹ Totok Suyanto, "Persepsi Kepala Sekolah dan Guru tentang Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Menengah Pertama" (Surabaya: Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan, 2006), 78.

⁴⁰ Adib S., *Wawancara*, Lamongan, 8 Januari 2011; Sutrisno, Suciati, *Wawancara*, Lamongan, 8 Januari 2011; dan Maria Ulfa, *Wawancara*, Lamongan, 11 Januari 2011.

⁴¹ Dokumentasi hasil laporan kantin kejujuran SMPN C, Pasuruan, 29 Juli 2011.

saling menutupi ketika ada temannya yang secara sengaja tidak membayar. Temuan ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Erikson (1963); Garbarino dan Brofenbrenner (1967); dan Kohlberg dan Lickona (1976) bahwa anak usia 12-15 tahun pada masa *adolescence: identity vs role confusion* (mencari identitas diri vs salah peran/kebingungan), di mana tidak membayar di kantin kejujuran merupakan bentuk pencarian identitas diri dan rasa solidaritas sehingga dengan mudah dipengaruhi teman sejawat untuk melakukan hal-hal yang negatif.⁴² Sementara pendapat lain menyatakan bahwa anak pada usia 8-14 tahun merupakan tahap *peer-oriented morality* (memenuhi harapan lingkungan). Pada fase ini, lingkungan sebaya mulai memberikan pengaruh pada anak sehingga tindakannya akan menyesuaikan dengan teman sebaya agar dapat diterima dalam kelompok.⁴³ Demikian juga dalam pandangan Kohlberg (1975) bahwa anak-anak pada usia 12-15 tahun masuk dalam tingkatan kedua (*conventional*) pada *stage three*, yakni *interpersonal accord and conformity (social norms) (the good boy/good girl attitude)*.⁴⁴ Tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi “anak manis”. Selanjutnya, terjadi sebuah proses perkembangan ke arah sosialitas dan moralitas kelompok. Kesadaran dan kepedulian atas kelompok akrab, serta tercipta sebuah penilaian akan dirinya di hadapan kelompok. Siswa yang membayar dan tidak membayar di kantin kejujuran bisa jadi mendapatkan pengaruh dari teman sebaya (*peer group*). Dalam satu kelompok ada siswa yang tidak membayar dan mengajak teman-temannya, jika tidak mau akan “dicap” sebagai anak yang penakut, tidak mempunyai solidaritas terhadap kelompok. Pola-pola semacam ini terjadi pada masa-masa usia 12-15 tahun.

Untuk itu, model kantin kejujuran akan lebih baik jika diawali dengan model induktif, yakni dengan membuat kantin-kantin di setiap kelas, dengan nama “pojok kejujuran”, artinya setiap kelas akan mempunyai satu kantin kejujuran yang menjadi tanggung jawab kelas yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menghabituisikan

⁴² Erik H. Erikson. “Identity: Youth and Crisis” (New York: W. W. Norton, 1968), dalam http://psychology.about.com/od/psychosocialtheories/a/psychosocial_3.htm, 128.

⁴³ James Garbarino dan Urie Brofenbrenner, “The Socialization of Moral Judgment and Behavior in Cross-Cultural Perspective”, dalam Thomas Lickona (ed.), *Moral Development Behavior* (New York: Holt Rinehart and Winston, 1976), 70-83.

⁴⁴ Lawrence Kohlberg, *Moral Stages and Moralization: The Cognitive-developmental Approach* (NY: Rinehart and Winston, 1976). 256.

tingkah laku jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam lingkup yang kecil terlebih dahulu. Kantin kejujuran di tingkat kelas bertujuan untuk mempersiapkan mental siswa untuk membangun kantin kejujuran tingkat sekolah. Jika kantin kejujuran di tingkat kelas sudah berjalan dengan baik baru ditingkatkan ke area yang lebih luas yakni lingkup sekolah.⁴⁵

Budaya lain yang layak dikembangkan sebagai pendukung PAK di sekolah adalah gerakan antimenyontek. Keberhasilan budaya menyontek di SMPN B karena adanya konsistensi dalam menerapkan yang dilakukan kepala sekolah dan guru. Meskipun menyontek bukanlah korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun sebenarnya dalam arti yang lebih luas dapat dikategorikan sebagai “korupsi”, yakni berbuat curang, tidak jujur, dan manipulatif atau dengan kata lain menyontek pada dasarnya merupakan bibit-bibit korupsi.⁴⁶ Menghabituasikan budaya antimenyontek secara ekstensif dan berjenjang pada semua jenjang pendidikan merupakan usaha dalam rangka menguatkan pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan. Nilai-nilai kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Islam, bahkan Nabi Muhammad memberikan keteladanan dalam setiap aspek kehidupan.⁴⁷

Penerapan kedisiplinan juga merupakan bentuk budaya yang mendukung PAK di sekolah. Kedisiplinan bukan hanya ketepatan waktu masuk dan pulang sekolah, namun dalam dimensi yang lebih luas termasuk di dalamnya ketepatan mengumpulkan tugas dalam berbagai mata pelajaran, menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan, penggunaan peralatan laboratorium, dan lain-lain. Beberapa variasi penerapan kedisiplinan di sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini dapat dijadikan sebagai model. Cara mendisiplinkan warga sekolah yang ada di SMPN D bisa juga dijadikan model. Kepala sekolah SMPN D menyadari bahwa kantin kejujuran kurang berhasil, maka langkah yang diambil diawali dengan cara membuat komitmen untuk meningkatkan kejujuran melalui disiplin diri. Pengembangan 7 (tujuh) budaya, yaitu: (1) malu datang

⁴⁵ Harmanto, “Mencari Model Pendidikan Antikorupsi bagi Siswa SMP dan MTs”, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Hasil Penelitian yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2008.

⁴⁶ Dharma Kesuma, et al., *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi* (Bandung: Pustaka Aulia Press, 2008), 75.

⁴⁷ *Ibid.*, 172.

terlambat/pulang cepat, (2) malu melihat rekan sibuk melakukan aktivitas, (3) malu melanggar peraturan, (4) malu berbuat salah, (5) malu bekerja tidak berprestasi, (6) malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan (7) malu tidak berperan dalam mewujudkan kebersihan kantor/sekolah. Disiplin di SMPN D dikembangkan budaya mengakui jika melanggar tata tertib. Pada tahap awal yang dikembangkan tentang disiplin diri siswa. Jika ada siswa yang datang terlambat atau tidak memakai atribut dan kelengkapan seragam sekolah secara sadar menghadap ke guru piket dan mengakui atau menunjukkan jenis pelanggarannya. Jika secara jujur mengakui, maka ia akan mendapatkan keringanan dengan syarat pelanggaran yang dilakukan kurang dari tiga kali. Namun jika tidak mengakui dan diketahui guru piket makan, ia akan mendapatkan hukuman lima poin pelanggaran di buku pribadi siswa. Usaha yang dilakukan SMPN D berhasil dengan meningkatkan kesadaran siswa untuk menaati tata tertib sekolah dengan suka rela menemui guru piket jika merasa melakukan pelanggaran.

Di SMPN F, pelaksanaan kedisiplinan langsung di bawah kendali kepala sekolah. Diawali dengan membuat kebijakan tiga budaya yang akan dikembangkan, yaitu: (1) disiplin tanpa diawasi, (2) bekerja tanpa diperintah, dan (3) tanggung jawab tanpa diminta.⁴⁸ Wujud komitmen kepala sekolah untuk membudayakan kedisiplinan dengan cara terjun langsung memberikan contoh kepada siswa, guru, staf administrasi, dan petugas kebersihan. Misalnya, datang tepat waktu, memberitahu kepada wakil kepala sekolah jika ada keperluan pada saat jam sekolah, maupun pada waktu tertentu mengadakan supervisi di kelas tanpa mengurangi otoritas guru di kelas. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dihabituisasikan di SMPN D dan SMPN F terdapat kesamaan, yakni membangun kesadaran siswa akan pentingnya nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai kebutuhan hidup, bukan semata-mata melaksanakan kewajiban.⁴⁹

Kas kelas merupakan bentuk budaya yang dikembangkan di semua sekolah yang menjadi lokasi penelitian ini. Budaya ini merupakan ajang untuk pengelolaan anggaran dalam lingkungan yang paling kecil di sekolah. Kas kelas berasal dari, oleh, dan untuk warga

⁴⁸ M. Rofiq, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Februari 2011.

⁴⁹ Nurul Zuriyah, *Pendidikan Modal dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 77.

kelas di bawah bimbingan wali kelas.⁵⁰ Penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara terbuka setiap akhir bulan, sehingga diketahui peruntukan dan saldo setiap bulan. Keberadaan kas kelas memberikan lahan bagi siswa untuk melatih diri mengelola anggaran secara mandiri, tanggung jawab, dan menggunakan sesuai dengan keputusan bersama. Meskipun sederhana budaya semacam ini akan memberikan latihan secara praktis kepada siswa. Menempatkan kejujuran sebagai nilai pokok dalam PAK di sekolah yang kemudian dijabarkan ke dalam budaya sekolah merupakan bentuk yang sangat tepat. Rasulullah Muhammad selalu mengingatkan kepada umatnya agar bersikap jujur dalam segala hal.

Berlakulah jujur kalian, sebab jujur mengarahkan kita pada kebaikan, dan kebaikan mengantar kita ke surga. Tiada henti-hentinya seseorang berbuat jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang ahli kejujuran. Hindarilah olehmu sifat dusta sebab dusta mengajak kita pada kekejian, dan kekejian mengantar kita ke neraka. Tiada henti-hentinya seseorang melakukan kedustaan hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (H.R. Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, dan al-Tirmîdhî dari Ibn Mas'ûd).⁵¹

Oleh karenanya, tujuan utama PAK di sekolah tidak dikonstruksi mampu melacak dan berani melaporkan kasus-kasus korupsi, tetapi lebih diarahkan pada pembentukan pola pikir, sikap, kesadaran, dan perilaku nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, terbuka, dapat dipercaya, dan lain-lain. Jika ketidakjujuran (*cheating*) dan rendahnya tanggung jawab individu sebagai warga negara (*increasing self-centeredness and declining civic responsibility*) terjadi di kalangan generasi muda, maka hal itu merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa.⁵² Sementara Megawangi (2004) menambahkan pentingnya kejujuran/amanah (*honesty*) dalam pengembangan karakter⁵³ yang

⁵⁰ Ibid., 89.

⁵¹ Nasiruddin al-Barabbasi, *Kisah-kisah Islam Antikorupsi* (Bandung: PT. Mizan Utama, 2009), 19.

⁵² Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991), 13-18. Terdapat sepuluh karakteristik zaman yang harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada di kalangan remaja maka itu berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran (cetak tebal dari penulis). Kesepuluh karakteristik tersebut adalah (1) *violence and vandalism*, (2) *stealing*, (3) *cheating*, (4) *disrespect of authority*, (5) *peer cruelty*, (6) *bigotry*, (7) *bad language*, (8) *sexual precocity and abuse*, (9) *increasing self-centeredness and declining civic responsibility*, (10) *self-destructive behavior*.

⁵³ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa* (Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2004), 95. Nilai yang layak diajarkan anak

diperkuat oleh pendapat Brooks dan Goble (1997). Fokus pendidikan karakter diarahkan pada nilai “dapat dipercaya (*trustworthy*) yang meliputi sifat jujur (*honesty*) dan integritas (*integrity*), memperlakukan orang lain dengan hormat (*treats people with respect*), dan bertanggung jawab (*responsibility*)”.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan modal utama dalam pendidikan karakter di sekolah karena akan memberikan implikasi pada pengembangan nilai-nilai karakter yang lain. Hasil penelitian yang dilakukan Mat Min di Malaysia bahwa budaya sekolah seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan hormat-menghormati memberikan kontribusi dalam perilaku dan keberhasilan siswa dalam belajar.⁵⁵

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PAK yang dihabituisasikan melalui budaya islami di sekolah juga akan mendukung ketercapaian tujuan dua mata pelajaran di SMP, yakni Agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Tujuan mata pelajaran Agama untuk mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, disiplin, toleran (*tasâmuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.⁵⁶ Sedangkan tujuan mata pelajaran PKn agar peserta didik mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan

adalah (1) cinta Tuhan dengan segala ciptaannya (2) kemandirian dan tanggung jawab (3) kejujuran/amanah, bijaksana, (4) hormat dan santun, (5) dermawan, suka menolong, dan gotong royong, (6) percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, (7) kepemimpinan dan keadilan, (8) baik dan rendah hati, (9) toleransi, kedamaian, dan kesatuan.

⁵⁴ B. David Brooks and Frank G. Goble, *The Case of Character Education: The Role of the School in Teaching Values and Virtue* (Los Angeles: Studio 4 Production, 1997), 67-71. Deklarasi Aspen menghasilkan enam nilai etik utama (*core ethical values*), yaitu: (1) *trustworthy, honesty, integrity*, (2) *treats people with respect*, (3) *responsibility*, (4) *fair*, (5) *caring*, (6) *good citizen*.

⁵⁵ Ruhaini Binti Mat Min, “Budaya Sekolah: Implikasi terhadap Proses Pembelajaran secara Mengalami, *Jurnal Kemanusiaan*, No. 13 (Juni 2009), 63-78.

⁵⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, mata pelajaran Agama Islam.

bernegara, serta antikorupsi.⁵⁷ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa habituasi nilai-nilai islami dalam budaya sekolah menjadi komponen penting dalam pembentukan karakter siswa. Hal ini karena ajaran Islam mengajak kebaikan baik di dunia maupun di akhirat serta mengandung ajaran-ajaran yang bersifat universal.⁵⁸

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, kesimpulannya adalah (1) bahwa budaya islami di sekolah merupakan salah satu instrumen penting dalam keberhasilan PAK, di samping dukungan melalui mata pelajaran dan orang tua. Hal ini karena budaya islami yang dikembangkan dan dihabituisikan bersumber bukan saja didasarkan atas penalaran saja, namun menyentuh sampai aras kepercayaan dan keyakinan, (2) ada interaksi yang saling menguatkan antara materi yang dibelajarkan dalam mata pelajaran PKn dan agama Islam dengan praktik kantin kejujuran dan pembiasaan sikap dan perilaku melalui budaya islami yang dikembangkan di sekolah, dan (3) jenis budaya islami di sekolah yang mampu mendukung dalam PAK antara lain keteladanan kepala sekolah dan guru dalam berperilaku di sekolah, kejujuran siswa, dan konsistensi dalam penerapan aturan sekolah.

Saran-saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah (1) pentingnya sinkronisasi antara budaya berbasis nilai-nilai islami yang dikembangkan di sekolah dengan di rumah, agar saling berinteraksi dan menguatkan antara dua lembaga pendidikan tersebut, (2) nilai-nilai PAK seperti kejujuran, larangan menyontek, pengadaaan kas kelas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang dihabituisikan ke dalam berbagai aktivitas di sekolah penting untuk disosialisasikan kepada orang tua agar mendapatkan dukungan. Hal ini penting karena habituasi yang dilakukan di sekolah lebih sistematis dengan menggunakan tolok ukur tertentu baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Kondisi ini kemudian dikuatkan di lingkungan keluarga dalam bentuk pendidikan, pengasuhan, pembiasaan, dan keteladanan.

⁵⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*, mata pelajaran PKn.

⁵⁸ *Ibid.*, 78.

Daftar Rujukan

- Adib, S. *Wawancara*. Lamongan, 8 Januari 2011.
- Albab, Ulul. *A to Z: Korupsi Menumbuhkan Spirit Antikorupsi*. Surabaya: Jaring Pena, 2009.
- Azra, Azumardi. "Agama dan Pemberantasan Korupsi", *Kompas*, 5 September 2005.
- Barabbasi (al), Nasiruddin. *Kisah-kisah Islam Antikorupsi*. Bandung: PT. Mizan Utama, 2009.
- Betti, S. *Wawancara*. Surabaya, 10 Januari 2011.
- Brooks, B. David and Goble, Frank. G. *The Case of Character Education: The Role of the School in Teaching Values and Virtue*. Los Angeles: Studio 4 Production, 1997.
- Budimansyah, Dasim. "Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi", dalam pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Tidak diterbitkan, 2009.
- Deal, Terrence and Peterson, Ken D. "Strategies for Building School Cultures: Principals as Symbolic Leaders", dalam M. Sashkin & H. J. Walberg (ed.). *Educational Leadership and School Culture*. Berkeley, CA: McCutchan, 1993.
- Erikson, Erik H. "Childhood and Society", dalam http://psychology.about.com/od/psychosocialtheories/a/psychosocial_3.htm.
- Garbarino James, Brofenbrenner Urie. "The Socialization of Moral Judgment and Behavior in Cross-Cultural Perspective", dalam Lickona, Thomas (ed.). *Moral Development Behavior*. New York: Holt Rinehart and Winston, 1976.
- Haryanti, Any dan Suparti. *Wawancara*. Madiun, 26 Juli 2011.
- Hassan, Fuad. *Pendidikan adalah Pembudayaan: dalam Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2004.
- Ibrahim, M. Subhi dan Rukmana, Aan. "Agama untuk Antikorupsi", dalam Wijayanto dan Zachrie, R. (ed.). *Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Jamaliyah. *Wawancara*. Surabaya, 5 Januari 2011.

- Kesuma, Dharma, et al. *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press, 2008.
- Kodrianti, Yulia dan Willmanda, Enriko. *Wawancara*. Pasuruan, 18 Februari 2011.
- Kohlberg, Lawrence. *Moral Stages and Moralization: The Cognitive-Developmental Approach*. Holt, NY: Rinehart and Winston, 1976.
- Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1991.
- Maimunah, Siti. *Wawancara*. Pasuruan, 17 Februari 2011.
- Mat Min, Ruhaini. “Budaya Sekolah: Implikasi terhadap Proses Pembelajaran secara Mengalami”, *Jurnal Kemanusiaan*, No. 13, Juni 2009.
- Megawangi, Ratna. *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation, 2004.
- Mudjianti, Endang. *Wawancara*. Malang, 5 Maret 2011.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Purbo, Handoyo dan Narianto, Eko. *Wawancara*. Mojokerto, 6 April 2011.
- Rachman, Arif. “Bahaya Korupsi bagi Perekonomian”, dalam http://bisnis.vivanews.com/news/read/104915/bahaya_korupsi_bagipe_rekonomian.
- Rahayu, Lin Sumastuti. *Wawancara*. Madiun, 26 Juli 2011.
- Rahayu, Ninik. *Wawancara*. Madiun, 26 Juli 2011.
- Riyanti, Eni. *Wawancara*. Malang, 5 Maret 2011.
- Rofiq, M. *Wawancara*. Pasuruan, 17 Februari 2011.
- Sadimun. *Wawancara*. Surabaya, 5 Januari 2011.
- Slamet. *Wawancara*. Pasuruan, 17 Februari 2011.
- Soleh, Badrus. “Peran Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Islami di SMAN 2 Jember”. Malang: UIN Malang, 2010.
- Subiyantoro, Heru. *Wawancara*. Mojokerto, 4 April 2011.
- Sudarmanto. *Wawancara*. Malang, 2 Maret 2011.
- Sulasmining. *Wawancara*. Mojokerto, 6 April 2011.

Suparlan. “Membangun Budaya Sekolah”, dalam <http://suparlan.com/pages/post/membangun-budaya-sekolah238.php>. 2008.

Sutrisno dan Suciati. *Wawancara*. Lamongan, 8 Januari 2011.

Suyanto, Totok. “Persepsi Kepala Sekolah dan Guru tentang Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Menengah Pertama”. Surabaya, Laporan Penelitian Tidak Diterbitkan, 2006.

Transparency International Indonesia (TII). “Corruption Perception Index 2011: Indonesia Masih Berada di Jajaran Bawah Negara-negara Terbelenggu Korupsi”, dalam <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2011/12/01/corruption-perception-index-2011>. Akses Januari 2011.

-----. “Indek Persepsi Korupsi 2009: Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Lemah”, dalam <http://v1.ti.or.id/research-survey/93/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4675/>.

-----. “Indek Persepsi Korupsi 2010: Corruption as Usual”, dalam <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/10/26/corruption-perception-index-2010-global>.

-----. “Indeks Persepsi Korupsi 2007: Menagih Janji Presiden untuk Kembali Memimpin Gerakan Pemberantasan Korupsi”, dalam <http://v1.ti.or.id/researchsurvey/93/tahun/2007/bulan/09/tanggal/26/id/346>.

Transparency International Indonesia (TII). “Indeks Persepsi Korupsi 2008: Indeks Indonesia Naik Signifikan”, dalam <http://v1.ti.or.id/researchsurvey/93/tahun/2008/bulan/09/tanggal/23/id/3465/>.

Ulfa, Maria. *Wawancara*. Lamongan, 11 Januari 2011.

Zuriah, Nurul. *Pendidikan Modal dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.